



**BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU**

**NOMOR 5 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SANGGAU,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, ada beberapa urusan yang perlu didukung dengan jabatan- jabatan tertentu dalam rangka untuk mendukung visi, misi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Analisis Kebutuhan Jabatan dengan memperhitungkan rasio keseimbangan antara Beban Kerja dan jumlah Jabatan Fungsional pada setiap Perangkat Daerah ditambahkan dua jabatan fungsional yaitu : Analis Keuangan Pusat dan Daerah dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah sehingga perlu dilakukan Perubahan ketiga pada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 9) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 8 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 8); dan
- b. Nomor 9 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 9);

diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Lampiran ditambah dua angka sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 3 Januari 2017

**BUPATI SANGGAU,**  
ttd  
**PAOLUS HADI**

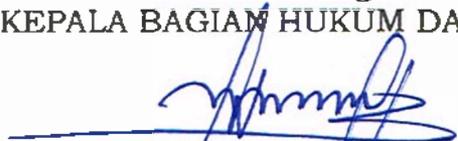
Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 3 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU**

ttd  
**A.L. LEYSANDRI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 5**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



**YAKOBUS, SH. MH**  
*Pembina Tingkat I (IV/b)*  
NIP. 19700223 199903 1 002

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 3 JANUARI 2017**  
**TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	PERATURAN YANG MENETAPKAN (PERMENPAN DAN RB)	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	INSTANSI PEMBINA
1.	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	Nomor 15 Tahun 2009	1) Sekretariat Daerah 2) Inspektorat Kabupaten	Kementerian Dalam Negeri
2.	1) Pemeriksa Merek 2) Pemeriksa Paten 3) Perancang Peraturan Perundang-undangan	Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 Nomor 47/KEP/M.PAN/6/2003 Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 1) Sekretariat Daerah 2) Sekretariat DPRD	Kementerian Hukum dan HAM
3.	1) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan 2) Pemeriksa Pajak 3) Penyuluh Pajak	Nomor 30/KEP/M.PAN/3/2003 Nomor 31/KEP/M.PAN/3/2003 Nomor PER 04/KEP/2/2006	Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah	Kementerian Keuangan
4.	1) Inspektur Ketenagalistrikan	Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002 Jo. KEP/04/M.PAN/12/2005	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Kementerian Perindustrian
6.	1) Penguji Mutu Barang 2) Pencera	Nomor 131/KEP/M.PAN/12/2002 Jo. KEP/05/M.PAN/1/2005 Nomor 128/KEP/M.PAN/12/2002 Jo. KEP/03/M.PAN/1/2005	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Kementerian Perdagangan

7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Medik Veteriner</li> <li>2) Paramedik Veteriner</li> <li>3) Pengawas Benih Tanaman</li> <li>4) Pengawas Bibit Ternak</li> <li>5) Pengawas Mutu Hasil Pertanian</li> <li>6) Pengawas Mutu Pakan</li> <li>7) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan</li> <li>8) Penyuluh Pertanian</li> <li>9) Analis Pasar Hasil Pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor 52 Tahun 2012</li> <li>Nomor 53 Tahun 2012</li> <li>Nomor 57/KEP/MK.WASPAN/9/1999 Jo. KEP/137/M.PAN/9/2004</li> <li>Nomor 2 Tahun 2011</li> <li>Nomor PER/17/M.PAN/4/2006</li> <li>Nomor 22 Tahun 2013</li> <li>Nomor PER/10/M.PAN/05/2008</li> <li>Nomor PER/02/M.PAN/2/2008</li> <li>Nomor 6 Tahun 2012 Jo. Nomor 23 Tahun 2013</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan</li> </ul>	Kementerian Pertanian
9.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengendali Frekuensi Radio</li> <li>2) Pengawas Keselamatan Pelayaran</li> <li>3) Penguji Kendaraan Bermotor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor KEP/51/M.PAN/4/2002 Jo. PER/27/M.PAN/11/2004</li> <li>Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004</li> <li>Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2011</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>Dinas Perhubungan</li> <li>Dinas Perhubungan</li> </ul>	Kementerian Perhubungan
10.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan</li> <li>2) Pengawas Perikanan (penggabungan dengan Pengawas Benih Ikan)</li> <li>3) Penyuluh Perikanan</li> <li>4) Analisis Pasar Hasil Perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor 22 Tahun 2010</li> <li>Nomor 1 Tahun 2011</li> <li>Nomor PER/19/M.PAN/10/2008</li> <li>Nomor 25 Tahun 2013</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan</li> </ul>	Kementerian Kelautan dan Perikanan

11.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengawas Ketenagakerjaan</li> <li>2) Instruktur</li> <li>3) Mediator Hubungan Industrial</li> <li>4) Pengantar Kerja</li> <li>5) Penggerak Swadaya Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor 19 Tahun 2010</li> <li>Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003</li> <li>Nomor PER /06/M.PAN/4/2009</li> <li>Nomor 06/KEP/MK.WASPAN/2/2000</li> <li>Nomor KEP/58/M.PAN/6/2004</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana</li> </ul>	Kementerian Tenaga Kerja
12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Teknik Pengairan</li> <li>2) Teknik Penyehatan Lingkungan</li> <li>3) Teknik Jalan dan Jembatan</li> <li>4) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan</li> <li>5) Penata Ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999</li> <li>Nomor 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999</li> <li>Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999</li> <li>Nomor 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999</li> <li>Nomor PER/10/M.PAN/6/2007</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Binamarga dan Sumberdaya Air</li> <li>Dinas Perumahan, Ciptakarya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>Dinas Binamarga dan Sumberdaya Air</li> <li>Dinas Perumahan, Ciptakarya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>Dinas Perumahan, Ciptakarya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> </ul>	Kementerian Pekerjaan Umum
13.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Administrator Kesehatan</li> <li>2) Apoteker</li> <li>3) Asisten Apoteker</li> <li>4) Bidan</li> <li>5) Dokter</li> <li>6) Dokter Gigi</li> <li>7) Epidemiologi Kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000</li> <li>Nomor 140/KEP/M.PAN/11/2003</li> <li>Nomor 07/KEP/MK.WASPAN/12/1999</li> <li>Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008</li> <li>Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003</li> <li>Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003</li> <li>Nomor 17/KEP/M.PAN/11/2000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Dinas Kesehatan</li> <li>2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman</li> <li>1) Dinas Kesehatan</li> <li>2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman</li> <li>1) Dinas Kesehatan</li> <li>2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman</li> <li>1) Dinas Kesehatan</li> <li>2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman</li> <li>1) Dinas Kesehatan</li> <li>2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman</li> <li>1) Dinas Kesehatan</li> <li>2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman</li> </ul>	Kementerian Kesehatan

8) Entomolog Kesehatan	Nomor 18/KEP/M.PAN/11/2000	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
9) Fisioterapis	Nomor KEP/04/M.PAN11/2004	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
10) Fisikawan Medis	Nomor PER/12/M.PAN/5/2008	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
11) Nutrisionis	Nomor 23/KEP/12/M.PAN/4/2001	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
12) Okupasi Terapis	Nomor PER/123/M.PAN/12/2005	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
13) Ortosis Prostesis	Nomor PER/122/M.PAN/12/2005	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
14) Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
15) Perawat	Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
16) Perawat Gigi	Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
17) Perekam Medis	Nomor 135/KEP/M.PAN/12/2002	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
18) Pranata Laboratorium Kesehatan	Nomor PER/08/M.PAN/3/2006	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
19) Psikolog Klinis	Nomor PER/11/M.PAN/5/2008	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
20) Radiografer	Nomor 133/KEP/M.PAN/12/2002	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
21) Refraksionis Optisien	Nomor PER/47/M.PAN/4/2005	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
22) Sanitarian	Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
23) Teknik Elektromedis	Nomor 41/KEP/M.PAN/4/2003	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman

	<p>24) Teknisi Gigi</p> <p>25) Terapis Transfusi Darah</p> <p>26) Terapis Wicara</p> <p>27) Dokter Pendidik Klinis</p> <p>28) Pembimbing Kesehatan Kerja</p>	<p>Nomor PER/05/M.PAN/4/2007</p> <p>Nomor PER/06/M.PAN/4/2007</p> <p>Nomor PER/48/M.PAN/4/2005</p> <p>Nomor PER/17/M.PAN/9/2008</p> <p>Nomor 13 Tahun 2013</p>	<p>1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman</p> <p>1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman</p> <p>1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman</p> <p>1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman</p> <p>1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman</p>	
14.	<p>1) Guru</p> <p>2) Penilik</p> <p>3) Pamong Belajar</p> <p>4) Pengawas Sekolah</p> <p>5) Pengembangan Teknologi Pembelajaran</p> <p>6) Pranata Laboratorium Pendidikan</p>	<p>Nomor 16 Tahun 2009</p> <p>Nomor 14 Tahun 2010</p> <p>Nomor 15 Tahun 2010</p> <p>Nomor 21 Tahun 2010</p> <p>Nomor PER/2/M.PAN/3/2009</p> <p>Nomor 3 Tahun 2010</p>	<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
15.	<p>1) Pekerja Sosial</p> <p>2) Penyuluh Sosial</p>	<p>Nomor KEP/03/M.PAN/1/2004</p> <p>Nomor PER/06/M.PAN/5/2008</p>	<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana</p> <p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana</p>	Kementerian Sosial
16.	Pamong Budaya	Nomor PER/09/M.PAN/5/2008	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Kementeran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
17.	<p>1) Adikara Siaran</p> <p>2) Teknisi Siaran</p> <p>3) Andalan Siaran</p> <p>4) Pranata Humas</p>	<p>Nomor 130/M.PAN/1989</p> <p>Nomor 128/M.PAN/1989</p> <p>Nomor 129/M.PAN/1989</p> <p>Nomor PER/109/M.PAN/11/2005</p>	<p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	Kementerian Komunikasi dan Informatika

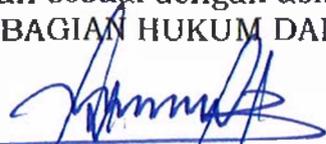
18.	1) Pengendali Dampak Lingkungan 2) Pengawas Lingkungan Hidup	Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 Nomor 39 Tahun 2011	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup
19.	Perencana	Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
20.	Analisis Kebijakan	Nomor 5 Tahun 2012	Sekretariat Daerah	Lembaga Administrasi Negara (LAN)
21.	Arsiparis	Nomor PER/3/M.PAN/3/2009	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Arsip Nasional (ANRI)
22.	1) Analisis Kepegawaian 2) Auditor Kepegawaian 3) Assessor SDM Aparatur	Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 Nomor 40 Tahun 2012 Nomor 41 Tahun 2012	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
23.	Pustakawan	Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
24.	Pranata Komputer	Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah	Badan Pusat Statistik
25.	Penyuluh Keluarga Berencana	Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
26.	Surveyor Pemetaan	Nomor 134/ KEP/ M.PAN/ 12/ 2002	1) Dinas Perumahan, Ciptakarya, Tataruang dan Pertanahan 2) Dinas Perkebunan dan Peternakan	Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL)
27.	Auditor	Nomor PER/220/KEP/M.PAN/6/2006 Jo. Nomor 51 Tahun 2012	Inspektorat	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

28.	Pengawas Obat dan Makanan	Nomor 48/KEP/M.PAN/8/2002	Dinas Kesehatan	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
29.	Penerjemah	Nomor PER/124/M.PAN/5/2006	Sekretariat Daerah	Sekretariat Negara
30.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Nomor 77 Tahun 2012	Sekretariat Daerah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
31.	Peneliti	Nomor KEP /128/M.PAN/9/2004	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
32.	Perekayasa	Nomor PER/219/M.PAN/6/2008	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
33.	Penyuluh Hukum	Nomor 3 Tahun 2014	Sekretariat Daerah	Kementerian Hukum dan HAM
34.	Satpol PP	Nomor 4 Tahun 2014	Satuan Polisi Pamong Praja	Kementerian Dalam Negeri
35.	Widyaiswara	Nomor 14 Tahun 2009	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Lembaga Administrasi Negara (LAN)
36.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Nomor 42 Tahun 2014	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kementerian Keuangan Republik Indonesia

37.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nomor 15 Tahun 2009	Inspektorat	Kementrian PAN & RB
-----	---	---------------------	-------------	---------------------

**BUPATI SANGGAU,**  
ttd  
**PAOLUS HADI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
**YAKOBUS, S.H. MH**  
*Pembina Tingkat I (IV/b)*  
NIP. 19700223 199903 1 002